

KERANGKA ACUAN

Posisi : Konsultan Pencarian Pendanaan
Jenis Penugasan : *Home-based*
Hari Kerja : 15 hari antara 12 Mei – 17 Juni 2016

A. Latar Belakang

Keberlanjutan finansial sering kali menjadi tantangan bagi banyak lembaga swadaya masyarakat, termasuk lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di isu hak asasi manusia, baik lembaga yang baru berdiri maupun yang sudah lama menjalankan aktivitasnya. Tidak sedikit lembaga yang terpaksa harus mengurangi, atau bahkan menghentikan aktivitasnya karena kekurangan dukungan finansial. Di tataran internasional, misalnya, Interights, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berperan besar dalam pemajuan hak asasi manusia selama kurun waktu 32 (tiga puluh dua) tahun, terpaksa menutup kantornya pada bulan Mei 2014 akibat ketiadaan dukungan finansial.

Di satu sisi, harus diakui bahwa tidak semua isu hak asasi manusia mendapatkan perhatian yang sama dari pemberi dukungan dana. Beberapa isu hak asasi manusia terkesan lebih populer dan mendominasi, dan menyebabkan isu hak asasi manusia lainnya menjadi marjinal. Selain itu, semakin kontroversial dan marjinal sebuah isu, pekerjaan pencarian dukungan dana pun menjadi semakin sulit.

Di sisi lain, beberapa pemerintah mulai menerapkan kebijakan yang ketat terhadap pemberian dana dukungan dari lembaga swadaya masyarakat asing kepada lembaga swadaya masyarakat lokal. Ambil contoh Rusia yang memutuskan untuk melarang pemberian dana dari lembaga swadaya masyarakat asing yang dianggap “*undesirable*”.¹ Hal ini membuat banyak lembaga swadaya masyarakat lokal kehilangan sumber pendanaan utamanya, dan berada dalam posisi terancam ‘gulung tikar’.

Banyak lembaga swadaya masyarakat yang mencoba mencari sumber dana alternatif, sehingga mereka tidak hanya mengandalkan pemberian dana dari lembaga swadaya masyarakat asing. Beberapa lembaga swadaya masyarakat mulai membuka usaha wiraswasta. Namun tentunya hal ini pun mustahil dilakukan tanpa adanya modal yang cukup besar untuk mendukung terwujudnya usaha tersebut.

Memasuki usianya yang ke-9, LBH Masyarakat telah banyak berkembang, baik dari segi jenis aktivitas, cakupan wilayah kerja dan isu, maupun jumlah personil. Namun, perlu diakui bahwa LBH Masyarakat juga tidak luput dari tantangan keberlanjutan finansial. LBH Masyarakat menyadari bahwa untuk terus berkarya dan memperluas jangkauan kerjanya, perlu dilakukan diversifikasi pendanaan guna memperkuat ketahanan finansial. Selama ini, LBH Masyarakat masih banyak mengandalkan dukungan dana dari hanya segelintir pendukung dana utama, yang seluruhnya adalah lembaga donor.

Dalam upaya untuk melakukan diversifikasi penggalangan dana, LBH Masyarakat sering mendapatkan penolakan, baik dari sumber pendanaan lokal maupun asing, dikarenakan fokus isu yang dianggap kontroversial atau bukan persoalan hak asasi manusia. Terlepas dari banyaknya penolakan tersebut, LBH Masyarakat tetap berada dalam posisi untuk terus memperjuangkan apa yang menjadi fokus kerjanya selama ini, sambil mencoba memetakan sumber-sumber pendanaan asing maupun lokal yang dapat mendukung serta mencari poin-poin keunggulan dari kerja-kerja LBH Masyarakat.

¹ <http://www.theguardian.com/law/2015/aug/26/ngos-face-restrictions-laws-human-rights-generation>

Awal 2016, LBH Masyarakat baru saja mengadakan rapat rencana strategisnya untuk menyusun rencana aksi prioritasnya selama lima tahun ke depan (2016-2020). Adapun tujuan umum LBH Masyarakat untuk lima tahun berikut adalah sebagai berikut: menyelenggarakan pemberdayaan hukum masyarakat dengan prioritas bagi komunitas orang dengan HIV, pemakai narkoba, pekerja seks, LGBT, dan orang dengan gangguan jiwa (termasuk penyuluhan hukum bagi tahanan); serta melakukan advokasi hukum/kebijakan strategis di isu yang berkaitan dengan kelompok marjinal tersebut dan juga orang yang berhadapan dengan hukuman mati/eksekusi. Sementara, tujuan khususnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan studi-studi mengenai pemanfaatan perempuan sebagai kurir peredaran gelap narkoba; dan keterkaitan antara hukuman mati dengan kesehatan jiwa;
2. Mendorong adanya konsep alternatif pemidanaan yang proporsional;
3. Mendorong dekriminialisasi pemakaian narkoba.

LBH Masyarakat menyusun ketiga tujuan khusus tersebut dengan mempertimbangkan keterkaitan/ketersinggungan antara satu fokus isu dengan fokus isu lainnya, dan persoalan kunci di satu fokus kelompok dengan kelompok lainnya. LBH Masyarakat pun menyadari bahwa fokus isu tersebut di atas akan erat bersinggungan dengan persoalan jender dan anak/anak muda. Oleh karena itu, dalam konteks ini, LBH Masyarakat akan turut memperhitungkan persoalan berkaitan dengan jender dan anak/anak muda dalam menjalani tujuan umum dan tujuan khusus lembaga selama lima tahun ke depan.

B. Capaian Penugasan

Untuk menyukseskan upaya diversifikasi pendanaan tersebut, LBH Masyarakat mencari konsultan paruh waktu yang dapat membantu proses tersebut. Adapun capaian dari kerja konsultan ini adalah:

1. Mengembangkan perencanaan dan strategi pendanaan dan penggalangan dana LBH Masyarakat,
2. Memetakan sumber-sumber pendanaan lokal dan asing yang potensial atau sesuai dengan fokus kerja dan jenis aktivitas yang dilakukan oleh LBH Masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan rencana aksi strategis LBH Masyarakat 2016-2020;
3. Mengevaluasi proposal pendanaan yang pernah/telah dibuat oleh LBH Masyarakat, serta;
4. Mengidentifikasi poin-poin penting ketika menyusun proposal pendanaan yang disesuaikan dengan kriteria sumber pendanaan tersebut.

C. Cakupan Kerja Penugasan

Adapun cakupan pekerjaan selama penugasan adalah:

- *Desk review:*
 - Menyusun perencanaan dan strategi pendanaan atau penggalangan dana,
 - Mempelajari dokumen Rastalara 2016 – 2020 LBH Masyarakat,
 - Memetakan/identifikasi donor-donor, baik nasional, regional, internasional, pemerintah maupun swasta
 - Mengevaluasi **tiga** proposal pendanaan LBH Masyarakat,
- Melakukan wawancara dengan staf-staf LBH Masyarakat untuk lebih mengenal kerja-kerja lembaga dan memperoleh *niche* dari kerja lembaga.

D. Durasi Penugasan dan Honorarium Konsultan

Konsultan menjalankan tugasnya selama **15 (lima belas) hari kerja**, terhitung sejak **12 Mei – 17 Juni 2016**. Penugasan ini bersifat home-based, tanpa disertai dengan perjalanan dinas. Untuk melaksanakan tugas ini, LBH Masyarakat menyediakan honorarium sebesar **USD 3,000** (tiga ribu dolar Amerika) atau setara dengan **Rp. 39.600.000,-** (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Honorarium ini mencakup segala keperluan konsultan dalam melaksanakan tugasnya, termasuk dalam hal melakukan wawancara dengan staf LBH Masyarakat. LBH Masyarakat tidak memberikan biaya penggantian lainnya atas pengeluaran konsultan.

LBH Masyarakat akan membayarkan paruh pertama honorarium pada saat penandatanganan kontrak kerjasama. Sisa paruh terakhir honorarium akan dibayarkan ketika konsultan telah menyelesaikan dan menyerahkan laporan tahap 2 kepada LBH Masyarakat.

E. Hasil Penugasan

Berikut adalah produk yang harus dihasilkan dari proses konsultasi ini:

Hasil	Tenggat Waktu
<p>Laporan Tahap 1 Laporan Evaluasi terhadap 3 Proposal LBH Masyarakat, termasuk, tetapi tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kekuatan dan kelemahan dari masing-masing proposal, • Area untuk perbaikan, dan, • Hal lain yang berkenaan dengan penyusunan proposal tersebut. 	25 Mei 2016
<p>Laporan Tahap 2 Laporan Pemetaan Potensi Sumber Pendanaan LBH Masyarakat, tetapi tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan dan strategi pendanaan dan penggalangan dana, • Semua informasi mengenai proses aplikasi pendanaan masing-masing donor potensial, • Fokus kerja masing-masing donor potensial. 	15 Juni 2016

F. Monitoring dan Pelaporan

Konsultan melakukan pelaporan langsung kepada Direktur LBH Masyarakat, melalui rapat bulanan di kantor LBH Masyarakat. Dalam rapat tersebut, konsultan wajib untuk memberikan laporan perkembangan penugasan.

G. Kualifikasi

Konsultan diharapkan untuk memiliki keahlian sebagai berikut:

- Memiliki pengalaman bekerja dengan donor nasional ataupun internasional selama setidaknya 8 tahun,
- Memiliki pengalaman menyusun proposal pendanaan proyek maupun penggalangan dana atau *fundraising*,
- Memiliki pengetahuan mengenai beragam lembaga donor dan portofolio kerja lembaga donor tersebut, dan berbagai model penggalangan dana,
- Memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai isu hak asasi manusia secara umum,
- Memiliki pengetahuan yang memadai di setidaknya-tidaknya **tiga** dari **enam** isu berikut, persoalan hak asasi manusia yang berkaitan dengan: HIV, narkoba, pekerja seks, LGBT, kesehatan jiwa, atau hukuman mati; baik dalam konteks nasional maupun global,
- Pernah bekerja sebagai konsultan evaluasi program/lembaga memberikan nilai tambah.

H. Aplikasi

LBH Masyarakat mengundang kandidat yang tertarik untuk mengajukan dokumen berikut ini:

- CV terbaru,
- Surat aplikasi yang menjelaskan pengalaman kerja yang relevan dengan cakupan kerja konsultan *fundraising* ini.

Mohon kirimkan aplikasi Anda ke Ricky Gunawan, Direktur LBH Masyarakat di alamat e-mail: rgunawan@lbhmasyarakat.org

Mohon cantumkan "Consultant_LBH Masyarakat" di subjek e-email Anda. Tenggat waktu aplikasi ini adalah: **Minggu, 8 Mei 2016, pukul 18:00 waktu Jakarta (GMT +7)**. Untuk informasi atau pertanyaan mengenai Kerangka Acuan ini silahkan hubungi: rgunawan@lbhmasyarakat.org

TERM OF REFERENCE

Title : Fundraising Consultant
Type of Assignment : Home-based
Working Days : 15 days within 12 May – 17 June 2016

A. Background

Financial sustainability often becomes a challenge for many civil society organisations, including those that work on human rights. This situation is true for both newly-established organisations and organisations that have served for a long period of time. Some organisations must reduce, or even stop their activities due to lack of funding. At the international level, Interights, a prominent human rights group that had worked for thirty two years in promoting human rights worldwide, has decided to shut down their office in May 2014 due to lack of financial support.

On the one hand, not all human rights issues receive the same interest from donors. Some issues are more 'attractive' than others. The domination of these human rights issues leads to the marginalisation of other issues. Often times, marginalised human rights issues are those related with marginalised groups or controversial issues with limited public support. The more controversial and marginalised an issue is, the more difficult it is to get funding support.

On the other hand, some governments have started to apply a strict regulation on international funding. Take for example Russia that decide to prohibit financial support from international organisations that are considered as 'undesirable'.² This situation has caused many local civil society organisations to lose their main funders, and are on the edge of being closed down.

Many civil society organisations attempt to address this issue by diversifying their source of incomes, looking for alternative ways to get financial support. Their goal is to be less dependent to donors. Some civil society organisations have started to open a small business or store. However, this requires them to first, have enough money to be put down as the capital.

In its ninth years of operation, LBH Masyarakat has developed significantly. It has more staffs, covers greater area in Indonesia, and widens the scope of its issues and activities. However, it is important to note that LBH Masyarakat also faces the same challenges with many other human rights organisations in terms of financial sustainability. LBH Masyarakat realises that it needs to diversify its funders and source of incomes in order to continue promoting human rights. Currently, the main source of income is from limited numbers of international donors.

On its effort to diversify funding, LBH Masyarakat often receive rejection from national or international donors due to its controversial and non-populist choice of issues. However, LBH Masyarakat is in a position to continue doing and advocating for the cause its believe in, while at the same time endeavours to map out source of fundings from international and national donors, and evaluates its strengths and weakness.

In the beginning of 2016, LBH Masyarakat held its Annual Strategic Planning Meeting, and developed its 2016 – 2020 Strategic Action Plan. LBH Masyarakat's general objective is *to undertake legal empowerment, with the priority of communities of people living with HIV, people who use drugs, sex workers, lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, and queer people, incarcerated people (i.e. detainees and prisoners), and people with mental illness; and to undertake strategic legal/policy*

² <http://www.theguardian.com/law/2015/aug/26/ngos-face-restrictions-laws-human-rights-generation>

advocacy on issues related with the interests of those prioritized communities as well as people facing the death penalty and/or execution. Meanwhile, its specific objectives are:

1. To study the use of women as drug mules in the illicit drug trafficking and to undertake strategic advocacy on the abolition of the death penalty and its intersections with mental health.
2. To promote a concept of alternative and proportionate sentencing.
3. To push for decriminalization of drug use.

LBH Masyarakat composed these three specific objectives by taking into account the correlation between one specific objective to another, and strategic issues of one prioritized community to another. LBH Masyarakat also realised that those issues on focus will be closely related with gender and youth issues. Thus, in this context, LBH Masyarakat will also take into account any issues related with gender and youth in realising its general and specific objectives.

B. Outcome of the Assignment

In order to succeed LBH Masyarakat's effort in diversifying its source of fundings, LBH Masyarakat is looking for a part-time consultant to help with that. The outcome for the work of the part-time consultant:

1. A plan and strategy of funding and fundraising is developed,
2. Both national and international source of fundings that focus on the same, or relevant issues with LBH Masyarakat's work and 2016 – 2020 Strategic Action Plan, and/or that could potentially be LBH Masyarakat's funders, is mapped out.
3. Three LBH Masyarakat's past funding proposals is reviewed,
4. Critical points in developing a future funding proposal adjusted with the criteria of fundings from potential donors are identified.

C. Scope of Assignment

The scopes of this assignment are:

- To develop a plan and strategy of funding and fundraising,
- To conduct a desk review of:
 - The 2016 – 2020 Strategic Action Plan
 - Relevant documents or information in order to map/identify national, regional, and international donors, both private and government (bilateral/multilateral),
 - Three of LBH Masyarakat's past funding proposals,
- To conduct interviews with LBH Masyarakat's staffs in order to know the organization better and understand its niche.

D. Duration and Consultant Fee

Consultant's working period is **15 (fifteen)** days, from **12 May until 17 June 2016**. This assignment is a home-based assignment with no outside city travel works. The consultant fee is **USD 3,000** (three thousand US dollars) or equivalent to **IDR 39,600,000** (thirty nine million and six hundred thousand rupiah). This fee also covers all expenses in delivering the assignment, including, but not limited to, travel cost or meeting cost when conducting interviews with LBH Masyarakat's staffs. There is no further fee/cost provided to reimburse consultant's expenses.

E. Deliverables

Below are the delivery output of this assignment:

Product	Deadline
First stage report Evaluation Report of three LBH Masyarakat's past funding proposal, which includes, but not limited to:	25 May 2016

<ul style="list-style-type: none"> • The strength and weakness of each proposal, • Areas for improvements, and • Other information concerning with the proposals. 	
<p>Second Stage Report Report on Mapping Potential Source of Funding for LBH Masyarakat, which includes, but not limited to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planning and strategy of funding and fundraising, • All relevant information on funding application processes, • Focuses of those donors. 	15 June 2016

F. Monitoring and Reporting

The consultant will report directly to the Director of LBH Masyarakat, through a monthly meeting at LBH Masyarakat's office. In that meeting, the consultant must report the development of the assignment.

G. Qualifications

The consultant is expected to have the following criteria:

- Minimum of eight years experience in working with national or international donors,
- Experience in developing funding proposals and fundraising activities,
- Adequate understanding or familiarity of various donors and their portfolios, as well as various fundraising models,
- Adequate understanding of human rights in general,
- Adequate understanding on, at least **three** of the following **six** human rights issues that are concerned/intersected with: HIV, drugs, sex worker, LGBT, mental health, or death penalty; both in the local and international context.
- Experience as a consultant for program or organisational evaluation is an added value.

H. Application

LBH Masyarakat invites interested candidates to submit the following documents:

- Recent and updated CV,
- An application letter describing previous relevant experience with the abovementioned scope of work.

Please submit your application to Ricky Gunawan, Director of LBH Masyarakat, to this email address: rgunawan@lbhmasyarakat.org

Please write "Consultant_LBH Masyarakat" in the email subject line. The deadline for this application is: **Sunday, 8 May 2016, 18:00 Jakarta time (GMT +7)**. For further information or questions about this ToR please contact: rgunawan@lbhmasyarakat.org